

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di balik kekayaan dan keindahan alamnya, Indonesia merupakan negara yang secara internasional dikenal juga sebagai laboratorium bencana. Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (*volcanic arc*) yang memanjang dari Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat (Arnold, 1986).

Global Risk Index (GRI) pada tahun 2021 menempatkan Indonesia pada urutan ke 27 di dunia sebagai negara dengan tingkat resiko kebencanaan tinggi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai *leading sector* juga telah mengeluarkan Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) yang kemudian membagi indeks resiko berdasarkan wilayah yang ada di seluruh Indonesia (Aslam, 2020).

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU No.24 tahun 2007).

Dari pengertian di atas, berdasarkan pengalaman empiris di lapangan korban jiwa manusia dapat kita kelompokkan menjadi korban

hidup, korban meninggal dunia dan korban hilang. Korban yang masih hidup memerlukan suatu penanganan *holistic*, baik secara medis, psikologis, dan aspek lain yang bertujuan untuk mengembalikan kapasitas korban dalam melanjutkan kehidupannya. Sedangkan bagi korban yang telah meninggal dunia kebutuhannya adalah untuk dapat dikenali atau diidentifikasi.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah memberikan amanat kepada pemerintah dan masyarakat untuk melakukan upaya identifikasi terhadap mayat yang tidak dikenal sehingga dapat dilaksanakan pemakaman yang layak sesuai dengan agama yang dianutnya. Selain hal tersebut, pengidentifikasian juga diperlukan untuk memberikan legalitas secara hukum yang berhubungan dengan ahli waris, asuransi, kasus hukum dan juga administrasi kependudukan yang lain. Keberhasilan identifikasi juga berpotensi untuk memberikan reduksi tekanan psikologis bagi keluarga yang ditinggalkan (Mundakir, 2009).

Pengidentifikasian korban meninggal bukan merupakan suatu hal yang sederhana. Kondisi dari jenazah pada kejadian bencana dapat ditemukan dengan kondisi yang sudah tidak dapat dikenali secara visual dengan kondisi jenazah yang sudah mengalami pembusukan, berupa bagian tubuh yang tidak lengkap, maupun ada dalam kondisi hangus terbakar. Untuk itulah diperlukan suatu metode pengidentifikasian jenazah yang disebut sebagai *Disaster Victim Identification (DVI)*.

Prosedur inilah yang kemudian dilaksanakan oleh DVI Polri dengan menggunakan empat fase yang sudah distandarisasi secara internasional melalui pembentukan *DVI guideline* oleh interpol di markas besar Lyon Prancis pada 2013. Keempat fase tersebut terdiri dari : *Scene, Post-mortem, Ante-mortem, dan Reconciliation (Interpol DVI Guideline, 2018)*.

Pelaksanaan Operasi DVI harus mempertimbangkan juga mengenai aspek legalitas dan hukum, juga aspek religi dan budaya setempat (*interpol DVI Guideline, 2018*). Perbedaan Hukum, Budaya, dan Agama di berbagai negara menjadikan operasi DVI yang dilaksanakan di

setiap negara menjadi unik ditentukan oleh pertimbangan dari ketiga faktor tersebut.

Operasi DVI dianggap berhasil dengan sempurna apabila semua korban baik jenazah maupun *body part* dapat dikenali seluruhnya, padahal dalam kondisi bencana massal, seringkali kita tidak dapat menemukan seluruh korban meninggal baik dalam bentuk jenazah utuh maupun dalam bentuk *body part*. Kesulitan penemuan korban meninggal di lapangan dipengaruhi juga oleh beberapa kendala dan faktor penyulit diantaranya : medan, cuaca, dan juga jenis bencana yang sedang terjadi. Jenis bencana dengan medan sulit seperti kecelakaan pesawat dan perairan akan lebih sulit dilaksanakan dibandingkan dengan kecelakaan yang ada di darat. Kecelakaan dengan ledakan yang menyebabkan banyaknya fragmen dan *body part* juga menyulitkan proses identifikasi.

Kesulitan identifikasi jenazah juga dapat dihubungkan dengan keutuhan jenazah akibat paparan bencana. Jenazah akibat ledakan, terbakar, dan tenggelam akan memiliki karakteristik yang berbeda baik dari sisa jaringan yang bisa diidentifikasi, maupun dari kecepatan proses pembusukan yang terjadi. Semakin utuh dan baik kondisi jenazah, maka pengidentifikasi akan semakin tinggi probabilitasnya.

Dihubungkan dengan identifikasi, pencarian bencana dengan *open disaster* akan lebih sulit ditentukan kepastiannya dibandingkan dengan *close disaster* dimana manifest para korban sudah diketahui sebelumnya secara lengkap. Jumlah korban yang pasti akan memudahkan keseluruhan proses DVI karena penemuan data akan lebih pasti pada tahap *post-mortem*, maupun *ante-mortem*.

Pelaksanaan Operasi *Disaster Victim Identification* (DVI) dalam peristiwa bencana massal telah banyak dilakukan di Indonesia dan mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat atas dilaksanakannya operasi DVI tersebut, karena dirasakan manfaatnya, akan tetapi penilaian intern dari tim DVI sendiri belum pernah dilakukan. Tidak adanya penilaian itu karena belum ada standar penilaian terhadap keberhasilan suatu

operasi DVI, misalnya untuk pertanyaan: apakah suatu operasi DVI dianggap sukses jika hanya membutuhkan waktu singkat? Apakah suatu operasi DVI dianggap sukses jika 100% jenazah teridentifikasi? Sebaliknya, apakah dianggap gagal jika memakan waktu lama dan hanya sedikit jenazah yang teridentifikasi? (Wirianto, 2010).

Dari jurnal yang dibuat oleh Warih Wirianto dan Ahmad yudianto (2010) perlu disepakati suatu standar penilaian keberhasilan suatu operasi DVI. Penilaian itu harus bisa dilakukan oleh tiap anggota tim DVI secara perseorangan, mudah dan terukur namun, karena itu penilaian dalam bentuk daftar tilik bisa menjadi pilihan. Untuk itu perlu disepakati variabel-variabel yang akan dinilai, serta berapa nilai tiap-tiap variabel tersebut. Diusulkan daftar variabel dengan masing-masing nilai yang disusun dalam table skoring.

Tabel 1.1 Tabel Skoring Penilaian Keberhasilan Operasi DVI

No	Variabel	Parameter	Skor	Bobot Skor	Nilai Maksimal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Unit TKP				
	- Koordinator TKP	Keberadaan	0 – 1	1	1
	- Pembagian Sektor TKP	Pelaksanaan	0 – 1	2	2
	- Kantong Jenazah	Keberadaan	0 – 1	1	1
	- Label Kantong Jenazah	Pelaksanaan	0 – 1	1	1
	- Kantong Property yang terpisah	Keberadaan	0 – 1	1	1
	- Label Kantong Property	Pelaksanaan	0 – 1	1	1
	- Foto TKP	Pelaksanaan	0 – 1	2	2
	- Sketsa TKP	Pelaksanaan	0 – 1	2	2
	- Pengisian Form PM hal. B	Pelaksanaan	0 – 1	1	1
	- Berita acara penyerahan Jenazah ke Kamar Jenazah	Keberadaan	0 – 1	1	1
	- Evaluasi harian	Pelaksanaan	0 – 1	1	1
sub total					14
2	Unit Post Mortem (Mortuary)				
	- Koordinator Kamar Jenazah	Keberadaan	0 – 1	1	1

No	Variabel	Parameter	Skor	Bobot Skor	Nilai Maksimal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Koordinator Pemindahan Jenazah	Keberadaan	0 – 1	1	1
	- Buku Serah Terima Jenazah	Keberadaan	0 – 1	1	1
	- Pengelompokan Jenazah	Pelaksanaan	0 – 1	3	3
	- Ahli Patologi Forensik	Keberadaan	0 – 1	1	1
	- Pemeriksaan ciri-ciri medis	Pelaksanaan	0 – 2	2	4
	- Pemeriksaan Sidik Jari	Pelaksanaan	0 – 1	2	2
	- Ahli Kedokteran Gigi Forensik	Keberadaan	0 – 1	1	1
	- Pemeriksaan Gigi geligi	Pelaksanaan	0 – 1	3	3
	- Tim Fotografi	Pelaksanaan	0 – 2	2	4
	- Foto jenazah dan property	Pelaksanaan	0 – 1	1	1
	- Pengisian Form PM	Pelaksanaan	0 – 2	1	2
	- Pengambilan sampel DNA	Pelaksanaan	0 – 1	1	1
	- Penatalaksanaan Property				
	- Foto rontgent				
	- Evaluasi Harian				
sub total					31
3	Unit Ante Mortem (AM)				
	- Koordinator data AM	Keberadaan	0 – 1	1	1
	- Unit Orang Hilang	Keberadaan	0 – 1	2	2
	- Ruang khusus pelaporan orang hilang	Keberadaan	0 – 1	2	2
	- Daftar korban hidup, mati, dan hilang	Keberadaan	0 – 1	2	2
	- Pengisian Form AM	Pelaksanaan	0 – 2	2	4
	- Pengelompokan data	Pelaksanaan	0 – 1	1	1
	- Pusat Komunikasi Lintas Sektoral	Keberadaan	0 – 1	2	2
	- Alat komunikasi: Internet, telp, facsimile	Keberadaan	0 – 2	1	2
	- Evaluasi harian	Pelaksanaan	0 - 1	1	1
sub total					17
4	Unit Pembanding Data				
	- Koordinator Unit Pembanding data	Keberadaan	0 – 1	1	1
	- Ruang rekonsiliasi	Keberadaan	0 – 1	2	2

No	Variabel	Parameter	Skor	Bobot Skor	Nilai Maksimal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Penyusunan arsip AM dan PM	Pelaksanaan Keberadaan	0 – 1 0 – 1	2 2	2 2
	- Tabel eliminasi	Keberadaan	0 – 1	2	2
	- Tim Pelepasan Jenazah	Pelaksanaan	0 – 1	1	1
	- Evaluasi harian				
sub total					10
5	Unit Pendukung				
	- Tim Keamanan	Keberadaan	0 – 2	1	2
	- Air bersih cukup	Ketersediaan	0 – 1	2	2
	- Alat Universal Precaution	Ketersediaan	0 – 1	2	2
	- Pendingin jenazah	Keberadaan	0 – 2	1	2
	- Mesin cuci	Keberadaan	0 – 1	1	1
	- Insektisida	Keberadaan	0 – 1	1	1
	- Makanan sehat bagi tim DVI	Ketersediaan	0 – 1	1	1
	- Tempat ibadah bagi tim DVI	Keberadaan	0 – 1	1	1
	- Istirahat teratur bagi tim DVI	Pelaksanaan	0 – 1	1	1
	- Rotasi Personil tim DVI	Pelaksanaan	0 - 1	1	1
sub total					14
6	Unit Khusus				
	- Perawatan jenazah menurut agama	Pelaksanaan	0 – 1	2	2
	- Peti jenazah	Ketersediaan	0 - 1	2	2
sub total					4
7	Debreifing	Pelaksanaan	0 - 1	10	10
Jumlah Skor Total Maksimal					100

Sumber : Wilianto, Warih. dan Ahmad Yudianto. (2010).

Sistem penilaian yang digagas oleh Warih dan Yudianto ini sampai saat ini belum pernah diaplikasikan dalam operasi DVI dan berorientasi hanya pada kelengkapan prosedur dan tahapan demi tahapan pada Operasi DVI. Penilaian keberhasilan operasi DVI secara umum masih

menggunakan **p**ersentase jenazah yang teridentifikasi sebagai ukuran keberhasilan suatu operasi DVI. Operasi DVI selama ini dianggap berhasil apabila memiliki persentase yang tinggi antara jenazah yang teridentifikasi dengan jenazah yang ditemukan.

Dari beberapa Laporan Pelaksanaan Operasi DVI, peneliti mencoba memberikan beberapa contoh pelaksanaan operasi DVI seperti yang tertuang dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.2 Tabel Sampel Pelaksanaan Operasi DVI POLRI

No.	Bencana	Tahun	Jenis bencana	Jumlah korban (+)	Jumlah korban teridentifikasi	Permasalahan Lapangan
1	Bom Bali 1	2002	Open Disaster	202	202 (100%)	Sebagian warga negara asing
2	Bom Bali 2	2005	Open Disaster	26	26 (100%)	Sebagian warga negara asing
3	Gempa, Tsunami, dan liquifaksi Palu	2018	Open Disaster	4.340	218 (5,02 %)	Pencarian dihentikan sebelum masa tanggap darurat selesai
4	Kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182	2019	Close Disaster	62	59 (95,1 %)	Kondisi jenazah yang tidak baik, dan tantangan cuaca dan arus
5	Tenggelamnya KM Sinar Bangun	2018	Close Disaster	94	4 (4,2 %)	Penghentian pencarian jenazah oleh pemerintah

Sumber : diolah oleh peneliti (2022)

Operasi DVI pada Bom Bali 1 dan Bom Bali 2 merupakan salah satu contoh operasi dengan keberhasilan identifikasi sampai dengan 100 %. Dengan jenis bencana *open disaster* dan melibatkan korban dari beberapa negara menjadikan proses DVI terutama pada fase 3 (*ante mortem*) menjadi suatu tantangan. Namun hal ini dapat diselesaikan dengan baik oleh tim DVI dengan capaian pengidentifikasian seluruh korban (Purwanti, 2013).

Pada operasi DVI Sriwijaya Air Sj 182 dimana dapat diidentifikasi sebanyak 59 jenazah dari 62 manifest korban yang ada di pesawat. Padahal apabila kita analisa kondisi pesawat yang meledak dan jatuh di dalam air akan mempercepat proses pembusukan, dan juga lokasi yang berada di tengah laut membawa konsekuensi adanya hambatan alam yang lain seperti arus laut, cuaca di laut, juga dapat menjadi kendala. Namun kita dapat melihat bahwa angka capaian identifikasi yang tinggi.

Hal ini berbeda dengan kasus serupa yang terjadi di Sumatra utara yaitu tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba, dimana dari 94 orang yang dinyatakan meninggal dan hilang, hanya empat yang berhasil diidentifikasi. Kebijakan dan keputusan pemerintah pada saat itu merupakan hal yang cukup menarik karena pemerintah yang diwakili Luhut Binsar Panjaitan yang pada saat itu menjabat Menko Kemaritiman mengatakan bahwa jenazah dan kapal tidak diangkat karena adanya tekanan yang besar di dalam danau yang mencapai 45 bar yang dapat berpotensi meledaknya kapal. Kepala KNKT Soerjanto Tjahyono juga mengatakan bahwa jenazah tidak terangkat bisa dimungkinkan karena terlilit sejenis tanaman ganggang. Tjahyono juga mengatakan bahwa luas danau toba dan kedalamannya merupakan hal yang harus dipertimbangkan, sehingga pada saat itu pemerintah memutuskan untuk menghentikan pencarian korban.

Siklus penanganan kebencanaan di Indonesia dilaksanakan melalui fase pencegahan dan mitigasi, fase kesiapsiagaan, fase tanggap darurat, dan fase rekonstruksi dan pemulihan. Masa tanggap darurat merupakan masa sesaat setelah terjadi bencana dan erat hubungannya dengan operasi DVI, terutama pada DVI fase 1 yakni pengolahan TKP yang sebagian besar kegiatannya adalah penemuan dan pencatatan jenazah dan *body part*.

Di Indonesia, regulasi pada saat kejadian bencana diatur melalui PP no 21 tahun 2008 dengan BNPB sebagai *leading sector*. Berdasarkan PP tersebut penentuan masa tanggap darurat ditentukan oleh kepala

daerah setempat. Penentuan masa tanggap darurat berimplikasi kepada beberapa faktor, namun untuk operasi DVI penentuan masa tanggap darurat ini mempengaruhi terutama pada DVI fase 1. Pencarian korban akan dihentikan setelah masa tanggap darurat selesai, sehingga kemungkinan korban meninggal ataupun *body part* baru yang diserahkan kepada tim DVI akan terhenti.

Fase 1 DVI berupa penanganan TKP dan pencarian korban dan *body part* merupakan fase yang penting karena akan berimplikasi pada fase-fase lanjutannya. Kesulitan di lapangan dalam menemukan jenazah dan *body part* dipengaruhi oleh jenis bencana, cuaca, medan, kemampuan personil, dan peralatan, serta ketersediaan anggaran (Hengky, 2012). Faktor faktor ini tentunya harus dijadikan salah satu pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam hal ini kepala daerah dalam menentukan lama masa tanggap darurat.

Selanjutnya pada Operasi DVI pada peristiwa Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Palu, Sulawesi Tengah pada tahun 2019, kita mengetahui bahwa peristiwa tersebut mengakibatkan meninggalnya 4.340 jiwa dan diperkirakan masih ada 5000 korban masih terkubur di dalam tanah Petobo yang mengalami likuifaksi. Berdasarkan berbagai pertimbangan, diputuskan pencarian korban hanya dilaksanakan 2 minggu, sehingga Operasi DVI fase 1 pun akhirnya terhenti yang berarti operasi DVI hanya akan berfokus pada fase selanjutnya saja. Tim DVI Polri yang terpusat di Rumah Sakit Bhayangkara Palu didatangkan dari berbagai provinsi yaitu Sulbar, Sultra, Sulut, Jatim, Jabar, Jateng, Mabes Polri, sumut, sumsel, Maluku, untuk membantu operasi DVI disana. Selain itu juga didatangkan ahli forensik dan identifikasi dengan jumlah hampir mencapai 98 orang. Namun, dengan besarnya operasi dan kesiapan tim, hasil akhir dari operasi tersebut hanya mampu mengidentifikasi 218 jenazah, yang menyebabkan jumlah korban yang diidentifikasi pada operasi ini menjadi tidak signifikan. (*Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bid DVI Pusdokkes POLRI, 2018.*)

Sehubungan dengan latar belakang masalah di atas, terdapat perbedaan dari teori mengenai DVI yang sudah ada dengan berbagai kejadian dan fenomena yang ada di lapangan. Keberhasilan operasi DVI selama ini hanya dinilai melalui kesiapan tim secara internal saja berdasarkan tabel skoring yang sudah ada maupun dari keberhasilan jumlah jenazah yang berhasil diidentifikasi. Padahal, pada fakta di lapangan terdapat berbagai variasi kondisi dan situasi yang kemudian menjadi faktor - faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan operasi DVI yang perlu diperhatikan. Suatu operasi yang dinilai secara baik secara skoring, belum tentu baik tingkat keberhasilannya. Variable yang sebelumnya tidak diperhatikan inilah yang menjadi alasan peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan judul Pengaruh Jenis Bencana, Lama Masa Tanggap Darurat, dan Jumlah Korban terhadap Tingkat Keberhasilan Operasi *Disaster Victim Identification* (DVI) Polri.

1.2 Identifikasi Masalah

Letak Indonesia secara geografis menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi ancaman bencana yang cukup tinggi bahkan dijuluki sebagai Laboratorium Bencana.

- a. Bencana berpotensi mengakibatkan korban, baik korban hidup maupun korban meninggal dunia. Korban meninggal dunia memerlukan identifikasi.
- b. Identifikasi yang tidak dapat dilakukan secara sederhana dilakukan melalui suatu system yang dinamakan *Disaster Victim Identification* (DVI).
- c. Pelaksanaan DVI merupakan operasi yang unik karena harus mempertimbangkan aspek legal, religi, dan budaya.
- d. Dalam aspek legal di Indonesia, penanggulangan bencana diatur oleh UU no 24 tahun 2007 dan dituangkan dalam PP no 21 tahun 2008 tentang penanggulangan bencana. Dalam Peraturan tersebut penetapan masa tanggap darurat berarti juga

merupakan masa dilaksanakannya operasi DVI, terutama DVI Fase 1.

- e. Operasi DVI yang selama ini dilaksanakan di Indonesia belum pernah dinilai dan dievaluasi untuk mengetahui keberhasilan dari operasi dan juga sebagai bahan evaluasi agar operasi DVI ke depan menjadi semakin baik.
- f. Penelitian sebelumnya mengenai keberhasilan operasi DVI dibuat berupa instrumen dalam bentuk skoring.
- g. Metode skoring belum pernah digunakan dan dalam beberapa contoh operasi DVI terdapat berbagai variasi dari persentase jumlah korban yang dapat diidentifikasi oleh tim DVI.
- h. Faktor penentu keberhasilan lain belum pernah diteliti sebelumnya untuk menentukan apakah operasi DVI berhasil selain melihat dari persentase jumlah korban yang berhasil diidentifikasi.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini akan dilakukan pembatasan masalah mengingat adanya keluasaan permasalahan, kelayakan, dan urgensi masalah tersebut serta keterbatasan dalam hal waktu, biaya atau kemampuan peneliti. Pada penelitian ini dipilih variabel terikat berupa keberhasilan Operasi DVI Polri yang kemudian dipengaruhi oleh tiga variabel bebas. Variabel pertama adalah mengenai jenis bencana. Jenis bencana dalam identifikasi bisa berupa *close disaster*, maupun *open disaster*. Variabel kedua adalah lama masa tanggap darurat, dimana ini akan mempengaruhi juga kapan operasi DVI fase 1 (*scene*) dihentikan, sehingga akan berimplikasi kepada seluruh fase. Variabel ketiga adalah jumlah atau jumlah korban meninggal yang ditemukan pada saat terjadi bencana

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Apakah jenis bencana berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan Operasi DVI Polri?
- b. Apakah lama masa tanggap darurat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan Operasi DVI Polri?
- c. Apakah jumlah korban meninggal berpengaruh terhadap keberhasilan Operasi DVI?
- d. Apakah jenis bencana, lama masa tanggap darurat, dan jumlah korban secara bersama sama berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan Operasi DVI?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan, sebagai berikut:

- a. Menganalisis pengaruh jenis bencana terhadap tingkat keberhasilan Operasi DVI Polri
- b. Menganalisis pengaruh lama masa tanggap darurat terhadap tingkat keberhasilan Operasi DVI Polri
- c. Menganalisis pengaruh jumlah korban yang ditemukan terhadap tingkat keberhasilan Operasi DVI Polri.
- d. Menganalisis pengaruh jenis bencana, lama masa tanggap darurat, dan jumlah korban secara simultan terhadap tingkat keberhasilan Operasi DVI Polri.

1.6 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

- a. Manfaat Teroritis
Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu kebencanaan, khususnya mengembangkan model dan mengidentifikasi faktor yang

mempengaruhi tingkat keberhasilan operasi DVI.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga dapat berkontribusi dan dijadikan bahan masukan dalam membuat kebijakan dan upaya dalam penanggulangan kebencanaan, antara lain:

1) Polri

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan agar operasi DVI selanjutnya lebih efektif dan efisien.

2) Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Dalam menentukan lama masa tanggap darurat berdasarkan jenis bencana, jumlah korban yang sedang terjadi sehingga jumlah korban meninggal yang dapat diidentifikasi akan maksimal.

3) Tim DVI

Dalam menyusun perencanaan Operasi DVI sehingga kebutuhan sarana, prasana, dan anggaran dalam melaksanakan operasi DVI menjadi efektif dan efisien.

4) Peneliti Dan Penggiat Kebencanaan

Sebagai bahan penelitian selanjutnya di bidang penanggulangan kebencanaan khususnya dalam menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu operasi DVI.

5) Masyarakat Korban Bencana

Dengan adanya penelitian di bidang keberhasilan operasi DVI diharapkan DVI polri dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal dan hasilnya dapat lebih dirasakan oleh masyarakat